

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Adanya perubahan *output* dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat

melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.¹

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.²

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.³

Menurut Prof. Simon Kuznets⁴, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-

¹ Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2008, hlm. 44-45.

² Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

³ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

⁴ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 44.

penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal.⁵ Dalam hal Ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

⁵ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta, 1999, hlm. 12.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi.⁶

Ketiganya adalah:

- a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c) Kemajuan teknologi

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).⁷

1. Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.
2. Pemerataan (*equity*), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat

⁶ Todaro, *Op.Cit*, hlm. 92.

⁷ Fitrah afrizal, *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011*,Makasar,hlm.12.

yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.

3. Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:⁸

a. Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas

⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

b. Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis *financial* Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi

yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya)

e. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.⁹

a. Pendekatan produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha¹⁰ yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan

⁹ BPS, *Op.Cit*, hlm. 7.

¹⁰ Katalog BPS, *PDRB Tahun 2010*, hlm. 3.

- 4) Listrik, gas, dan air bersih
 - 5) Bangunan dan Konstruksi
 - 6) Perdagangan, hotel dan restoran
 - 7) Pengangkutan dan komunikasi
 - 8) Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
 - 9) Jasa-jasa lainnya
- b. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir¹¹, dari:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
 - 2) Konsumsi pemerintah
 - 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
 - 4) Pembentukan stok
 - 5) Ekspor netto (ekspor dikurang impor)
- c. Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak

¹¹ *Ibid*, hlm. 5.

penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB , kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha.

Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi rill dapat dihitung.

3. Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain¹²:

- a. Sumber daya alam
- b. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk

¹² Laurensius Julian PP, *Op.Cit*, hlm. 115.

- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Sistem sosial
- e. Pasar

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut¹³:

$$r_{(t-1)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Ket:

r_{t-1} = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun yang dihitung

$PDRB_{(t-1)}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

4. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam

¹³ *Ibid*, hlm, 114.

bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.¹⁴

Menurut Abdurrahman Yusro¹⁵, pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam QS. Nuh10-12:¹⁶

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

Artinya: “10. Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, 11. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 12. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”.

¹⁴ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 124.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 139.

¹⁶ Departemen Agama, RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2010, hlm. 570.

Dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S Al-Ar'raaf 96:¹⁷

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: "Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".

Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhan, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan.

5. Indikasi Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 151.

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri, Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁸

a. Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

b. Tingginya Kegiatan Investasi

Dalam kegiatan ekonomi kegiatan produksi harus tetap berjalan, dengan cara memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi taupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah, sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat sebagai efek domino. Dalam kegiatan investasi harus memprioritaskan segmen yang ada, yaitu:

¹⁸ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004, hlm. 142.

- 1) Kegiatan investasi untuk menyediakan bahan dasar kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) Investasi untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan daei segala gangguan, dengan mendirikan pabrik senjata atau peralatan perang lainnya.
- 3) Menyediakan infrastruktur perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional.

Sumber-sumber investasi bisa didapatkan dari kekayaan masyarakat ataupun badan usaha milik negara, seperti minyak bumi maupun industri tambang lainnya. Konsep harta dalam ekonomi islam, sebenarnya mendorong seseorang untuk melakukan investasi. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam syari'ah¹⁹, yaitu:

- 1) Melarang royaltis konsumsi, dan menjaga keseimbangan dalam berkonsumsi.
- 2) Mendorong seseorang untuk bekerja dan menjadikannya sebagai ibadah.
- 3) Menjauhkan diri dari meminta-minta atau bergabung pada orang lain
- 4) Melarang tindakan penimbunan (ikhtiar) dan ribawi
- 5) Mewajibkan membayar zakat dan membagi warisan

Kesemuanya itu merupakan upaya yang mengarah pada investasi dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 143.

c. Efisiensi produksi

Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terlebih dalam penggunaan produksi. Schumpeter menyatakan, inovasi (penemuan teknologi baru) merupakan inti pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi akan mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Urgensi pasar

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar. Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang dialami negara-negara berkembang adalah, segmentasi pasar yang dimiliki sebagai wahana *supply* produk yang dihasilkan. *Market share* yang dimiliki sangat kecil, sehingga biaya produksi yang dibutuhkan sangat besar. Dampaknya harga produk yang ditawarkan tidak kompetitif. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perdagangan internasional yang menyudutkan bagi langkah negara-negara berkembang. Ada beberapa kebijakan yang menyebabkan produk-produk negara berkembang tidak kompetitif dengan negara-negara maju. Dengan adanya *market share* yang relatif sempit, akan mematikan kegiatan investasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada nilai PDRB. Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara berkembang bisa bekerja sama untuk menciptakan sebuah

mekanisme pasar pada kawasan tertentu guna menggairahkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.²⁰

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

B. Tinjauan Tentang Investasi

Beberapa sektor yang dapat mempengaruhi perekonomian dalam pendekatan pengeluaran yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sektor investasi dan konsumsi/belanja pemerintah. Investasi memberikan kunci terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Dengan peran ganda maka investasi tidak hanya dapat menciptakan pendapatan tetapi juga investasi dapat memperbesar kapasitas produksi dalam perekonomian.²¹

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Investasi tercipta dari penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak dengan tujuan memperbesar *output*. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara bahkan wilayah.

²⁰ *Ibid*, hlm. 144.

²¹ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 59.

Penanaman modal/investasi sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.²²

Bagi suatu Negara investasi tidak hanya untuk memaksimalkan *output*, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru. Adanya investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang.²³

Penanaman modal swasta di Indonesia sudah dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal untuk kebutuhan dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Undang-undang ini sebagai revisi perubahan dari UU.No.11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan UU.No.12 Tahun 1970 Tentang

²² Sadono Sukirno, *MakroEkonomi Teori Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 121.

²³ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Yogyakarta, 2014, hlm. 164.

Penanaman Modal Dalam Negeri yang sudah tidak sesuai dengan percepatan perekonomian dan perkembangan hukum nasional khususnya dibidang penanaman modal. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka penanaman modal swasta dapat dibagi menjadi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.²⁴

2. Jenis-jenis Investasi

Berdasarkan sumberdaya yang digunakan, investasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut²⁵:

a. Investasi Negara

Investasi ini adalah investasi yang dilakukan oleh Negara, atau sumber daya investasi tersebut berasal dari milik atau kekayaan Negara. Dalam pelaksanaannya investasi ini dilakukan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi dengan karakteristik seperti ini bersifat nirlaba atau *non profit motive*, misalnya pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, sekolah, taman, pasar, listrik, rumah sakit, pelabuhan, Bandar udara (bandara), terminal, alat pertahanan Negara, kantor pemerintahan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dana atau pembiayaan yang dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara/ Daerah (APBN) atau (APBD).

²⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

²⁵ Henry faizal noor, *Ekonomi Public (ekonomi untuk kesejahteraan rakyat)*, cet. Pertama, PT. Indeks, Jakarta, 2005, hlm.49.

Investasi ini menghasilkan nilai tambah berupa barang dan jasa, lapangan pekerjaan, sewa, dan bunga, tanpa surplus usaha.

b. Investasi Swata

Investasi swasta ini adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi atau perusahaan seperti: a. Usaha Mikro (belum punya badan hukum), b. Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagian sudah berbadan hukum, c. Usaha Besar yang berbentuk PMA maupun PMDN.

3. Manfaat dan Tujuan Investasi

Investasi merupakan salah satu pembentuk pertumbuhan ekonomi yang berperan dalam peningkatan struktur ekonomi dan pembangunan Negara. Hal ini karena kegiatan investasi dapat menyumbang pendapatan tidak hanya Negara tetapi juga masyarakat. Secara khusus investasi memiliki manfaat terhadap perekonomian suatu daerah antara lain sebagai berikut:

a. Investasi yang bermanfaat untuk umum (Publik)

Pada dasarnya hampir semua bentuk investasi, bermanfaat bagi kepentingan publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Contohnya adalah investasi dibidang pendidikan dan sumberdaya manusia, investasi dibidang kesehatan, investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan,

pasar, energi dan sebagainya), investasi di bidang konservasi alam, investasi dibidang pengelolaan sampah, yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

- b. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu (pribadi atau rumah tangga)

Investasi yang mendatangkan manfaat pada kelompok masyarakat tertentu dan lingkungan tertentu, seperti investasi di bidang keagamaan, misalnya membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, dan investasi dibidang olahraga tertentu, bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu, sedangkan investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga, misalnya investasi untuk perumahan pribadi maupun keluarga, investasi untuk pendidikan pribadi maupun keluarga, investasi untuk usaha (mendapat penghasilan), serta investasi di bidang lain yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga.²⁶

Tujuan investasi pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. tujuan tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Membuka lapangan kerja bagi pekerja yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
- 2) Memberikan pendapatan bagi pekerja sehingga dapat mengurangi kefakiran dan kemiskinan penduduk.

²⁶ *Ibid*, hlm.47.

²⁷ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 74.

- 3) Memberikan jaminan ketentraman, ketenangan, kesejahteraan serta kebahagiaan hidup para pekerja dan keluarganya.
- 4) Berorientasi pada produksi barang dan jasa yang tidak mendatangkan mudharat bagi umat manusia termasuk alam dan segala isinya
- 5) Tidak menggunakan faktor produksi yang melanggar hukum-hukum Allah, baik dalam prosesnya maupun dalam zatnya.

4. Hubungan Investasi terhadap PDRB

Dalam skala makro, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian.²⁸

Menurut Todaro²⁹, persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk *output* dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu

²⁸ Sadono, *Loc.Cit.*

²⁹ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 92.

seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam pembentukan modal untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Harold dan Dommar memberikan peran kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan yang kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal.

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti pentingnya pembentukan investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan ekonomi. Arti pentingnya pembentukan investasi disini adalah bahwa masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor bahkan faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara.³⁰

Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah *output* dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN maupun PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian investasi PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah

³⁰ Eko Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi: Sebuah Pengetahuan Tingkat Dasar dan Menengah serta Advanced untuk Ilmu Ekonomi Makro*, cet Kedua, Beta Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 99.

tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

5. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut beberapa pandangan kontemporer, seorang muslim yang menginvestasikan dana atau tabungannya tidak akan dikenakan pajak pada jumlah yang telah diinvestasikannya, tetapi dikenakan pajak pada keuntungan yang dihasilkan dari investasinya, karena dalam perekonomian islami semua aset-aset yang tidak termanfaatkan dikenakan pajak, investor muslim akan lebih baik memanfaatkan dananya untuk investasi daripada mempertahankan dananya dalam bentuk yang tidak termanfaatkan.³¹

Selain itu, dengan adanya kegiatan investasi juga memungkinkan suatu masyarakat akan terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.³²

Investasi syariah tidak hanya berorientasi pada persoalan duniawi sebagaimana yang dikemukakan para ekonom sekuler. Ada unsur lain yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di masa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah.

³¹ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Makro Islami*, cetakan ke 7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.297.

³² Sadono, *Op.Cit*, hlm.225.

Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 34:³³

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Islam memadukan antara dimensi dunia & akhirat. Setelah kehidupan dunia yang fana, ada kehidupan akhirat yang abadi. Setiap muslim harus berupaya meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sarana dan masa yang harus dilewati untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat.

Konsep di atas bukanlah hal yang bisa diremehkan, dimana antara urusan dunia dengan akhirat tidak bisa dipisahkan. Sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar, termasuk salah satunya pada urusan ekonomi. Oleh karena itu, investasi sebagai salah satu bahasan yang ada pada ilmu ekonomi, tentunya juga memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi, investasi yang islami adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*). Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin

³³ Departemen Agama, RI, *Op.Cit*, hlm. 411.

di dunia dan akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

a. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi

Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari sistem ekonomi syariah, oleh sebab itu ada beberapa prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah adalah³⁴:

- 1) Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- 2) Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- 3) Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- 4) Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
- 5) Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidak jelasan/samar-samar).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam ekonomi Islam

Merujuk pada pendapat ahli ekonomi islam, yakni Metwally dalam buku Ekonomi Makro Islami, menyebutkan bahwa investasi di negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor sebagai berikut³⁵:

- 1) Terdapat sanksi untuk pemegang aset kurang/tidak produktif.

³⁴ Ingrid, *Op.Cit*, hlm. 15-16.

³⁵ Adiwarmar Karim, *Op.Cit*, hlm. 296.

- 2) Dilarang melakukan berbagai macam bentuk spekulasi dan segala macam judi (*maysir*).
- 3) Tingkat bunga untuk berbagai macam pinjaman adalah nol (0) dan sebagai gantinya dipakai sistem bagi hasil.

Dari ketiga kriteria di atas, menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam tingkat bunga tidak memberikan pengaruh apakah investasi dilakukan atau tidak. Oleh karena itu, *opportunity cost* yang digunakan untuk tujuan investasi adalah tingkat zakat yang dibayarkan atas dana tersebut. Dengan kata lain, ketika tabungan yang disalurkan tidak disalurkan ke investasi nyata, maka seseorang akan terbebani zakat (seperti yang telah ditentukan).

Jelas bahwa investasi dalam perekonomian Islami adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan juga bergantung pada bagian relative dari keuntungan yang dialokasikan antara investor dan mereka yang menyediakan dananya pada bentuk kerja sama atau pinjaman.

Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak dan melarang manusia melakukan investasi yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

c. Investasi Sektor Riil

Dalam ekonomi islam investasi sektor riil, yaitu investasi yang benar-benar ditanamkan secara langsung pada sektor usaha sehingga investasi pada sektor riil merupakan aktivitas investasi yang memiliki dampak langsung terhadap perkembangan pembangunan ekonomi secara langsung. Sebab, berpeluang menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan roda perekonomian, dan berpengaruh dalam perkembangan usaha yang berkaitan dari hulu ke hilirnya.

Ada beberapa pilihan mengenai investasi sektor riil yang dinilai lebih aman secara resiko dan memiliki tingkat keuntungan yang cukup tinggi, diantaranya:

1) Bisnis Properti

Bisnis properti seperti tanah, perumahan, apartemen, ruko, kos-kosan, dan lain sebagainya, telah menjadi bisnis yang terus berkembang sejak sekian lama. Hal tersebut tidak mengherankan, sebab nilai investasi pada bisnis properti sangat jarang sekali mengalami penurunan, bahkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sifat dari bisnis properti membutuhkan waktu yang relative jangka menengah ke atas kerana membutuhkan proses usaha yang tidak sebentar dan peningkatan nilai harga properti yang cukup panjang.

2) Hasil Bumi

Hasil bumi merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada setiap wilayah di muka bumi ini. Negara kita memiliki potensi lahan yang sangat banyak karena tanahnya begitu subur dan mengandung banyak materi di dalamnya. Banyak sekali orang-orang yang kaya karena investasi hasil bumi. Selain berkat karena memberikan manfaat riil seperti penambahan daya serap tenaga kerja, hasil bumi yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak, serta merupakan bentuk syukur atas karunia alam yang Allah SWT berikan kepada kita.

Hasil bumi yang dimaksud ialah investasi pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Masing-masing memiliki sifat bisnis yang berbeda karena sangat adanya keragaman objek materi yang diolah. Oleh karena itu, resiko usaha investasi pada hasil bumi memiliki macam variasi. Namun secara pola kerja sama usaha, relative memiliki banyak kesamaan, yaitu dengan menggunakan pola sewa lahan atau bagi hasil.

3) Waralaba

Waralaba adalah bisnis yang memiliki hubungan kemitraan yang usahanya kuat dan sukses dengan usahawan yang relative baru dalam usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan khususnya dibidang usaha penyediaan produk dan jasa langsung kepada konsumen. Jenis waralaba ini memberikan hak pada suatu

badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat dengan menggunakan merek dagang dan merek perusahaan. Sehingga anda tidak perlu repot lagi membangun suatu perusahaan dari awal, sebab semua sistem usaha, merek, bahkan pengelolaan SDM telah tersedia secara sistematis. Bisnis seperti ini sering kali ditemukan dalam industri makanan dan minuman.

C. Belanja Pemerintah

1. Pengertian Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dikeluarkan oleh pemerintah dari penggunaan ekonomi secara langsung yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat dalam arti seluas-luasnya.³⁶ Belanja pemerintah daerah tercermin dari belanja daerah yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Belanja pemerintah sama halnya dengan pengeluaran pemerintah. Menurut definisi belanja pemerintah diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu Negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.³⁷ Belanja pemerintah menjadi bagian penting dari perekonomian makro suatu negara, karena menentukan kemana kondisi ekonomi negara akan dibawa.

³⁶ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 174.

³⁷ *Ibid*, hlm. 175.

Oleh karena itu, belanja pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utama adalah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi Belanja Pemerintah

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.³⁸

Pengeluaran pemerintah Indonesia menurut menurut Dumairy³⁹ diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *pertama* pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, *kedua* pengeluaran pembangunan yaitu, pengeluaran yang dikeluarkan yang bersifat untuk menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik yang nantinya akan menimbulkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai program-program pembangunan dengan anggaran yang sudah disesuaikan yang sudah terealisasi.

³⁸ *Ibid*, hlm. 71.

³⁹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, cet Kelima, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 44.

Secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan, dan melaksanakan kebijakan stabilisasi pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi.⁴⁰

3. Hubungan belanja pemerintah terhadap PDRB

Belanja pemerintah merupakan belanja daerah yang manfaatnya satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.⁴¹

Berdasarkan peraturan yang baru Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi belanja diperbaiki dan dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.

Dalam instrumen belanja pemerintah terdapat alokasi belanja modal yang disebut sebagai komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 180.

⁴¹ Abdul Halim, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Jakarta, 2004, hlm. 4.

pemerintah daerah ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolute Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relative perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.⁴²

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional.⁴³ Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara yang terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan (Y).

4. Belanja Pemerintah dalam Islam

Negara sesungguhnya sangat berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Apabila ada rakyat yang menganggur atau miskin atau terlunta-lunta tanpa keluarga dan sanak famili, maka Negara wajib membantu dan menyelamatkan mereka dengan pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk

⁴² Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

⁴³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 450.

pemberdayaan maupun dalam bentuk santunan.⁴⁴ Demikian pula apabila rakyat memerlukan fasilitas sarana dan prasarana maka negarapun wajib untuk mengadakannya. Karena itulah negara membutuhkan dana atau pembiayaan yang cukup untuk tujuan kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan rakyat pada umumnya. Dana tersebut adalah bersumber dari penghasilan negara atau kepemilikan negara yang ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dalam islam keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah merupakan keniscayaan yang mesti menjadi pegangan pemerintah di negara manapun. Dengan kata lain pemerintah sangat membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang halal, baik dari hasil negara yang diperoleh dari pajak maupun non pajak termasuk sumber-sumber dana dari keuntungan perusahaan negara.⁴⁵

5. Kebijakan Anggaran Belanja Dalam Ekonomi Islam

Pada masa Rasulullah Saw kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah Saw.⁴⁶ Negara yang menganut demokrasi biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum tiap tahun, fakta anggaran belanja negara yang

⁴⁴ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 66.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 68.

⁴⁶ Taqyiddin An-nababan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm, 264.

menganut demokrasi tersebut adalah, bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen.⁴⁷

Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan dimasa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri.⁴⁸

Telah kita lihat bahwa selama masa Islam dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Jelaslah, dizaman modern penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. Pungutan zakat tidak memerlukan sistem organisasi yang lengkap yang membutuhkan biaya yang besar. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa “kekayaan harus

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 268.

⁴⁸ Abdul mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, hlm, 235.

diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin”⁴⁹ Zakat merupakan bentuk ibadah seperti amalan shalat setiap hari atau berpuasa sehingga kebanyakan orang berlomba-lomba mau menunjukkan melaksanakan tanggung jawab ini secepat mungkin.⁵⁰

Terangkum dengan jelas bahwa sistem perekonomian yang mengenai anggaran belanja menjadi suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat, yang telah diserahkan oleh syara' dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Selain itu Kebijakan pengeluaran (pembelanjaan) tercermin diantarnya adalah untuk kepentingan yang diarahkan pada pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Serta dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain pembiayaan proyek ataupun pembangunan fasilitas untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbada dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek. Akan tetapi kebijakan pengeluaran pemerintah Islam maupun modern saat ini sama-sama dialokasikan pada kemaslahatan umat yaitu untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

6. Kaidah Belanja Negara Dalam Ekonomi Islam

Kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal di mana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang telah

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 238.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 335.

dikumpulkan. Dengan kebijakan pengeluaran inilah negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan kebijakan ini pula maka negara bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat.⁵¹ Pemerintah diharapkan dapat menggunakan keuangan tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ketakwaan. Kebijakan pengeluaran harus bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok yang ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama, warna kulit, suku bangsa, dan status sosial.

Keberhasilan negara untuk melakukan kebijakan pengeluaran sesuai tujuan yang disyaratkan syariah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena kebijakan pengeluaran tersebut adalah suatu proses distribusi pendapatan kepada masyarakat.⁵²

Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syar'iyah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Qur'an dan Hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah tersebut adalah:⁵³

- a. Kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah masalah.

⁵¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 98.

⁵² *Ibid*, hllm, 99.

⁵³ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam; Konsep, Teori dan Analisis*, Alfabet, Bandung, 2010, hlm, 234.

- b. Menghindari *masyaqqoh* kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- c. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum.
- d. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Diantara tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam, yaitu:⁵⁴

- a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
- b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
- c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian:⁵⁵

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.

⁵⁴ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf; Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Yogyakarta, 2003, cet. ke-1, hlm, 153.

⁵⁵ *Ibid*, hlm,155.

- b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
- c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, mencakup pengadaan infrastruktur air, listrik, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya.⁵⁶

Selanjutnya adalah belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya. Bentuk pembelanjaan seperti ini biasanya melalui mekanisme subsidi, baik subsidi langsung seperti pemberian bantuan secara cuma-cuma atau subsidi tidak langsung melalui mekanisme produksi barang-barang yang disubsidi. Subsidi sendiri sesuai dengan konsep syariah yang memihak kepada kaum *fuqara* dalam hal kebijakan keuangan, yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Tetapi konsep subsidi harus dibenahi sehingga mekanisme tersebut mencapai tujuannya. Konsep tersebut di antaranya adalah dengan penentuan subsidi itu sendiri, yaitu bagi yang membutuhkan bukan dinikmati oleh orang kaya, atau subsidi dalam bentuk bantuan langsung.⁵⁷

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pengaruh tingkat investasi dan belanja pemerintah terhadap produk domestik regional bruto telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh

⁵⁶ Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam*, Pustaka Ibadah, Jakarta, 2003, hlm, 243.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.245.

Fitrah Afrizal yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan”⁵⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat investasi, dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB dengan nilai $t_{hitung} 7,021161 > 2,228 t_{tabel}$. Dari hasil penelitian belanja pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai $t_{hitung} 7,317007 > 2,228 t_{tabel}$. Dan dari hasil penelitian juga diketahui adanya pengaruh positif antara variabel tenaga kerja terhadap PDRB dengan nilai $t_{hitung} 3,106299 > 2,228 t_{tabel}$.

Trias Fajar Novianto melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh pendapatan asli daerah, investasi dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.⁵⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB dengan tingkat signifikan 0,016 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, hasil penelitian variabel investasi terhadap pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan tingkat signifikansi 0,322 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, hasil penelitian angkatan kerja terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dengan tingkat signifikansi 0,044 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05.

⁵⁸ Fitrah Afrizal, *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011*, Penelitian Terdahulu, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

⁵⁹ Trias Fajar Novianto, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi, dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah*, Penelitian Terdahulu, Jurusan IESP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

Tabel 2.1
Ringkasan Tinjauan Pustaka

Peneliti	Variabel		Hasil
	Bebas	Terikat	
Fitrah Afrizal (2013)	tingkat investasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja	Produk domestik regional bruto (PDRB)	Tingkat investasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011.
Trias Fajar Novianto (2013)	Pendapatan asli daerah, investasi dan angkatan kerja	Pertumbuhan PDRB	Pendapatan asli daerah dan angkatan kerja berpengaruh positif, sedangkan investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011.

E. Kerangka Pemikiran

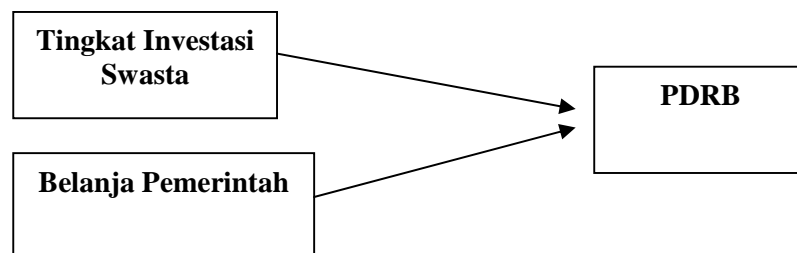
Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing di suatu negara merupakan salah satu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya alam yang tersedia maupun sumber daya manusia. Kondisi ini akan menarik para investor untuk menanam investasi, hal ini tentunya akan membawa manfaat yang positif tidak hanya bagi negara tetapi juga setiap daerah yang ada di negara yang bersangkutan. Pemberlakuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan titik tolak pemberdayaan pemerintah daerah secara lebih mandiri. Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapai hal itu, Propinsi Lampung menggali dana dari investasi yang ada dan menggali potensi daerahnya untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki Provinsi Lampung dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian, tingkat investasi yang

tinggi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah baik dari investasi asing maupun investasi dalam negeri yang akan meningkatkan nilai PDRB serta menambah sumber pendapatan tidak hanya pada daerah tetapi juga masyarakat.

Berdasarkan asumsi-asumsi pada pengaruh tingkat investasi dan belanja pemerintah terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Lampung, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagaimana dalam gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris dengan data.⁶⁰

⁶⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 96.

Sebuah hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu penelitian, yakni memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian.

Karena pada penelitian ini menggunakan data sampel maka hipotesis yang digunakan ialah hipotesis statistik, dinamakan hipotesis statistik karena penelitian ini untuk mengetahui keadaan populasi, sumber datanya menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi, yang dipelajari ialah data sampel.

Investasi dan belanja pemerintah merupakan satu kesatuan indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. Dengan peran ganda yang dimiliki. Investasi tidak hanya akan menambah kapasitas produksi tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat pada akhirnya akan menimbulkan pendapatan daerah. oleh karenanya sebagian Negara berkembang kemudian menjadikan investasi untuk meningkatkan perekonomian dan sebagai sektor penggerak ekonomi Negara yang tergambar dari nilai produk domestik (PDRB) yang semakin tinggi. Maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H_0 : Tingkat Investasi dan belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Lampung.

H_1 : Tingkat Investasi dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Lampung.